



Keterangan Media

Minggu, 14 Juni 2015

MASALAH LISTRIK PEDESAAN

Penyediaan listrik belum menjangkau seluruh desa-desa di Indonesia karena berbagai alasan dan kendala. Pembangunan infrastruktur jaringan listrik untuk daerah-daerah terpencil memerlukan investasi yang besar sementara kebutuhan listrik semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan penambahan penduduk. Alokasi Dana Desa diharapkan bisa menjadi bagian solusi strategis peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan termasuk didalamnya infrastruktur kelistrikan. Di sisi lain muncul banyak potensi permasalahan terkait pengelolaan dana tersebut antara lain terkait aspek regulasi & kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Tumpang tindihnya birokrasi, formulasi pembagian dana yang belum transparan, dan pembagian penghasilan perangkat desa yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri. Hal yang perlu dilakukan: 1) Penyusunan standar regulasi penyusunan-pengelolaan-pengawasan APBDesa yang mudah, akuntabel, dan transparan 2) Koordinasi kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan program dari masing-masing kementerian; 3) Pendampingan dari tingkat kabupaten untuk meminimalkan masalah terkait penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa, SDM pelaksana anggaran, dan sistem pengawasan; 4) Penyusunan harga baku barang dan jasa terkait pengadaan infrastruktur; 5) Di bidang infrastruktur kelistrikan perlu diadakan sosialisasi dan teknis penyediaan teknologi energi mandiri sehingga aplikasi di lapangan bisa tepat; 6) Mengintegrasikan sistem kelistrikan pedesaan dengan pengembangan infrastruktur agar biaya semakin efisien; 7) Pengarahan investasi tidak hanya pada pembangunan pembangkit konvensional tetapi juga pada manufaktur padat teknologi di bidang pembangkit EBT. Dengan skala produksi, teknologi EBT untuk pedesaan diharapkan bisa lebih murah; 8) Efisiensi dan penyehatan PLN akan meningkatkan kemampuan penyediaan listrik nasional.

Kedadaan desa di Indonesia: Ada 74.093 desa di Indonesia. 39.086 diantaranya termasuk desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 15,4 % atau lebih dari 12 ribu desa dan kelurahan belum teraliri listrik hingga akhir 2014. Relatif turun daripada tahun 2011 yang mencapai 14.676 desa atau kelurahan. Sebanyak 31.387 desa atau kelurahan tersebut jalan utamanya minim pencahayaan, menurun 41,77 % dari tahun 2011 sebanyak 32.834 desa atau kelurahan.

Kendala Penyediaan Listrik Pedesaan. Listrik merupakan kunci strategis dalam pemerataan keadilan sosial yang berefek kepada peningkatan taraf hidup masyarakat. Beberapa kendala penyediaan listrik pedesaan antara lain: 1) Jalur distribusi PLN menuntut adanya akses jalan ke lokasi tujuan, kebanyakan pedesaan di Indonesia masih memiliki akses yang sulit; 2) Penggunaan BBM sebagai pembangkit mengakibatkan biaya per watt menjadi mahal ditambah sebagian besar desa tersebut dibawah garis sejahtera; 3) Sumber energi EBT yang potensial di semua pedesaan juga memerlukan biaya *setup* yang tidak murah ditambah kurangnya pengetahuan tentang teknologi tersebut; 4) Investor swasta tidak tertarik untuk mendanai listrik di pedesaan karena dianggap tidak menguntungkan; 5) Permasalahan teknis perluasan distribusi termasuk diantaranya pembebasan lahan dan kepastian hukum; 6) Alokasi anggaran pemerintah yang relatif kecil dibanding luas wilayah.

Dasar penyediaan EBT: Dasar Penggunaan EBT bagi masyarakat pedesaan dan daerah yang jauh dari jangkauan distribusi PLN: 1) Sumber EBT relatif bisa didapatkan dimanapun tergantung potensi masing-masing daerah; 2) Penyaluran listrik dari pembangkit besar memerlukan biaya distribusi tinggi sehingga akan sangat mahal jika tidak disubsidi pemerintah; 3) Menekan penggunaan bahan bakar fosil yang saat ini relatif lebih membebani keuangan negara dan lingkungan; 4) Fungsi pemberdayaan masyarakat dengan memperkenalkan dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan atau usaha untuk menambah penghasilan terkait pembangkit misalnya koperasi dalam pengadaan biomassa atau kerjasama dengan PLN dalam penyediaan listrik.

EBT Potensial Sebagai Solusi: Ada tiga jenis teknologi pembangkit EBT yang sangat potensial di seluruh wilayah Indonesia yaitu pembangkit tenaga mikro hidro, tenaga surya, dan tenaga bayu (angin). Teknologi lain yang bisa digunakan antara lain biomassa. 1) **Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro:** Teknologi ini yang direkomendasikan beberapa ahli sebagai solusi kemandirian pedesaan dalam mendapatkan listrik. Pada dasarnya PLTM memanfaatkan dua hal yaitu debit air dan ketinggian jatuh air. Semakin besar debit air dan tinggi jatuhnya air maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Apabila tinggi jatuh yang ada pada lokasi sangat rendah, maka mesin konversi tidak menggunakan turbin tetapi menggunakan kincir air. 2) **Pembangkit Listrik Tenaga Surya:** Indonesia merupakan negara tropis dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Hal tersebut memungkinkan penggunaan panel surya dalam jumlah besar sebagai sumber energi primer. Pemerintah seharusnya bisa memulai langkah mandiri melalui BUMN dan lembaga penelitian (LIPI) dalam produksi panel *photovoltaic* (PV) dalam jumlah besar sehingga biaya per meter persegi panel tersebut bisa ditekan. 3) **Pembangkit Listrik Tenaga Bayu:** Energi angin yang ada di Indonesia berpotensi menyediakan daya sebesar 61.972 MW. Energi didapat dari putaran baling-baling yang dikonversi generator ke listrik.

Usaha Pemerintah: Secara Khusus Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan Rp 3,17 triliun untuk listrik pedesaan pada 2015 untuk mengaliri listrik ke 121.399 sambungan rumah tangga. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, ada 33 provinsi yang akan menjadi sasaran program listrik pedesaan. Paling banyak terdapat di Provinsi Gorontalo mencapai 10 ribu sambungan, kedua Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan, masing-masing 7.500 sambungan. Kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK) dan PLN dalam pembangunan listrik desa untuk menunjang pencapaian rasio elektrifikasi 99,4 persen pada 2024 dengan melakukan hal sebagai berikut: 1) Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek Gardu Induk Baru atau Extension Trafo Gardu Induk; 2) Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari pembangkit skala kecil baik Energi Baru Terbarukan (EBT) maupun pembangkit lainnya dan pembangkit mikro atau mini tenaga air; 3) Melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusun tersebut belum berlistrik, daerah terpencil dan daerah perbatasan; 4) Dimungkinkan pengadaan *hybrid* Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan *hybrid* PLTB yang sistemnya terhubung dengan grid PLN; 5) Melaksanakan program penyambungan listrik dan instalasi gratis bagi masyarakat yang tidak mampu dan daerah tertinggal.

Dana Desa: dalam APBN-P tahun 2015 pemerintah mengalokasikan Rp 20,76 triliun untuk alokasi anggaran dana desa dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih Rp 750 juta. Menurut UU No.5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna percepatan pembangunan. Di pasal 9 dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa salah satu prioritasnya adalah pembangunan dan pengelolaan energi mandiri guna mencukupi kebutuhan energi pada masing-masing desa. Lima besar provinsi penerima alokasi dana terbanyak antara lain Jawa Tengah (Rp 2,23 triliun), Jawa Timur (Rp 2,21 triliun), Aceh (Rp 1,71 triliun), Jawa Barat (Rp 1,59 triliun), dan Sumatera Utara (Rp 1,46 triliun). Lima Provinsi penerima dana terkecil, Kepulauan Riau (Rp 79,19 miliar), Bangka Belitung (91,93 miliar), DI Yogyakarta (Rp 128,07 miliar), Kalimantan Utara (Rp 129,87 miliar), dan Sulawesi Barat (Rp 162,02 miliar).

Sumber: PLN, Bappenas, Biro Pusat statistik, Kemen PDT, BKPM, Kemen ESDM, dan sumber lainnya